

BAB III

Sejarah Perkembangan Hubungan Republik Turki dan Jepang

Jepang merupakan mitra tertua Turki di Asia, dan hubungan antara kedua negara selalu baik dan tidak pernah ada ketegangan. Ketika Jepang mengembangkan perekonomiannya dalam periode pasca perang dunia kedua, dan pada saat yang sama Turki mulai meliberalisasikan perekonomiannya di tahun 1980-an, hubungan ekonomi antara kedua negara berkembang pesat. Pemerintah Turki telah melakukan upaya agar dapat meningkatkan hubungan ekonomi dengan Jepang sejak lama.

Dalam sejarahnya hubungan kedua negara antara Turki dan Jepang telah ada sejak abad ke 19 di mana saat itu Turki masih dalam era kesultanan Ustmani dan Jepang masih dalam era Meiji. Keputusan Menteri Luar negeri Jepang era Meiji, Munenori Terashima, yang mengusulkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Ustmani pada tahun 1873 dengan mengirim anggota Delegasi Iwakura, Genichiro Fukuchi dan Mokurai Shimaji. Kemudian kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan Jepang-Turki (*Japan-Ottoman Treaty of Friendship*) pada tahun 1893. (Akçadağ, 2010) Pada tahun 1890 Sultan Abdulhamid II Ottoman mengirim sebuah medali dengan kapal yang dipimpin oleh Osman Pasha untuk Kaisar Meiji Jepang. Dalam perjalanan pulang Kapal Ertugrul yang membawa delegasi Turki terjebak dalam badai dan tenggelam di lepas pantai Jepang, awak kapal yang awalnya terdiri dari 540 orang menjadi hanya 64 yang berhasil diselamatkan. (Çolakoğlu, 2014) Di era modern, yaitu awal abad ke-20, hubungan kedua negara secara politik dimulai pada tahun 1924 di mana Jepang

membuka kedutaan besar di Ankara saat Republik Turki baru terbentuk, yang membuat Jepang menjadi salah satu negara yang mengakui berdirinya Republik Turki di awal masa terbentuknya Republik Turki. Kemudian hal yang sama juga dilakukan oleh Republik Turki dengan membuka kedutaan besar di Tokyo setahun setelahnya. Namun saat perang dunia II pecah Turki memutuskan hubungannya dengan Jepang kemudian menyatakan perang melawan Jepang dan Jerman di tahun 1945. Setelah Perang Dunia II berakhir, kedua negara kembali membuka kedutaan besar di masing-masing negara pada tahun 1953 dan di tahun 1954 Jepang membuka Konsulat Jenderal di Istanbul. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2015)

A. Hubungan Turki dan Jepang di awal abad ke-20

Pada awal abad ke-20, Turki yang sebelumnya berbentuk kesultanan dengan nama kesultanan Ustmaniyah, berubah menjadi negara berbentuk Republik dengan nama Republik Turki. Seperti yang telah diketahui secara umum, Republik Turki dulunya adalah pusat dari pemerintahan Islam yang terakhir dengan nama kesultanan Ustmaniyah yang runtuh pada awal abad ke 20. Keruntuhan itu ditandai dengan berbagai gejolak internal seperti kudeta militer untuk menentang kesultanan dan eksternal seperti perang dunia I dan perang Balkan (1912) yang menyebabkan Turki Ustmani melemah dari sektor kekuatan militer maupun ekonomi. (Alfan, 2015) Kondisi Turki Ustmani yang terpuruk tersebut menyebabkan gerakan nasionalis Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal berusaha untuk mengakhiri pemerintahan Islam di Turki dan Setelah Mustafa Kemal berkuasa, agama Islam sebagai agama resmi dihilangkan dari konstitusi dengan dalih bahwa ajaran Islam tidak selaras dengan modernisasi dan pembangunan sehingga perlu dihilangkan dari

kehidupan masyarakat Turki. Kemudian mendirikan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. (Alfan, 2015)

Jepang merupakan salah satu negara pertama yang mengakui terbentuknya Republik Turki pada tahun 1924, hal ini menandakan bahwa sejak awal era Republik di Turki, Jepang dianggap sebagai negara yang ramah ke Turki. Kemudian Jepang mendirikan Kedutaan di Turki Maret 1925 dan Republik Turki membuka Kedutaan di Jepang pada bulan Juli 1925. Sebelumnya Turki dan Jepang membentuk Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Jepang-Turki dalam Kamar Dagang Osaka (*Osaka Chamber of Commerce*) pada tahun 1925. Kemudian atas usulan Asosiasi Perdagangan Luar Negeri Jepang-Turki, pada bulan Mei 1928 diadakan Konferensi Perdagangan Luar negeri Timur Dekat (*Near East Foreign Trade Conference*) dan pada tahun 1930 Perjanjian Dagang dan Navigasi (*Commerce and Navigation Treaty*) dibuat antara kedua negara dan ditandatangani di Ankara pada 11 Oktober 1930. Selain itu, Jepang pernah mengadakan *Japan Trade Exhibition* yang dibuka pada tahun 1928 sampai tahun 1937 di Istanbul. Serangkaian perjanjian kerja sama ini juga turut berkontribusi terhadap pengembangan hubungan persahabatan antara Jepang dan Turki. (Akçadağ, 2010)

B. Era Perang Dunia Kedua

Pada awal era perang dunia kedua, Turki telah mengambil kebijakan untuk berusaha menghindari perang dengan kubu mana pun. Kebijakan itu oleh presiden Selim Dengiril disebut dengan "*denge oyumu*" yang artinya "netral aktif". Kebijakan ini berhasil diimplementasikan pada masa kepemimpinan presiden Ismet Inonu dan membuat Turki terhindar dari perang (Aybay, 1999) namun pada tahun 1939 sampai tahun 1945 penerapan kebijakan ini mendapat kesulitan dan tekanan

secara langsung dari tiga negara yaitu Inggris, Jerman, dan Uni Soviet. Ketiga negara-negara ini mendesak Turki agar mau menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini dikarenakan pemimpin Turki seperti Inonu dan Menemencioğlu menerapkan dan mempraktikkan kebijakan tidak memihak yang kemudian membuat Turki tidak hanya berhasil menghindari keterlibatan dalam perang tetapi juga mampu mempengaruhi kedua pihak yang bertikai dalam mendukung kepentingan Turki. (Aybay, 1999)

Pada tanggal 2 Agustus 1944, Turki memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Jerman dan kebijakan serupa juga diambil oleh pemerintah Turki lima bulan setelah peristiwa itu, yaitu pada tanggal 3 Januari 1945 Turki memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Jepang. (Aybay, 1999) Dari kebijakan tersebut tampak jelas bahwa pemerintah Turki pada saat itu sangat dipengaruhi oleh Inggris dan Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan tersebut. Dalam sebuah berita di Ankara dikabarkan bahwa Duta Besar Amerika Serikat Steinhardt memberitahukan kepada Hasan Saka, menteri luar negeri Turki yang baru saat itu, bahwa pihak sekutu menginginkan Turki untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Pada awalnya Hasan Saka ragu untuk menyatakan setuju karena menurutnya kebijakan memutuskan hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Jepang tidak memberikan manfaat apapun terhadap Turki, namun pada akhirnya Turki menyatakan setuju dengan tawaran kebijakan tersebut dengan dalih jika sekutu Turki berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil maka Turki secara suka rela mendukungnya. Dan meskipun media massa menyebutkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan dagang tidak berarti berperang, pada akhirnya, beberapa bulan setelah itu

Turki menyatakan perang terhadap Jerman dan Jepang. Keputusan yang diambil oleh Turki ternyata mampu membuat pemerintah Tiongkok pada saat itu merasa puas karena Tiongkok menganggap keputusan tersebut mendukung pemerintah Tiongkok dalam mendorong Jepang lebih jauh ke dalam sebuah keadaan terisolasi. (Aybay, 1999)

Pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan dagang terhadap Jerman dan Jepang dan pernyataan perang terhadap Jerman dan Jepang terjadi pada tanggal 23 Februari 1945. Menurut konstitusi Turki, pernyataan perang terhadap negara lain merupakan wewenang parlemen di mana seluruh 401 anggota parlemen hadir dalam sidang plenolengkap dan dengan suara bulat menyatakan setuju atas proposal pemerintah. Hubungan antara deklarasi perang ini dengan keputusan yang diambil oleh tiga kekuatan besar kelompok Sekutu, yang melawan kelompok Axis pada Konferensi Yalta, cukup jelas terlihat. Dalam pidatonya pada sidang parlemen, menteri luar negeri Turki, Hasan Saka, secara jelas menyatakan bahwa proposal pemerintah untuk mendeklarasikan perang terhadap Jerman dan Turki tersebut telah terinspirasi oleh keputusan pemerintah Inggris dalam keputusan yang diambil pada Konferensi Yalta. (Aybay, 1999)

Konferensi Yalta itu sendiri adalah Konferensi yang diadakan di Crimea, yang saat itu masih menjadi bagian dari USSR, pada tanggal 4 Februari sampai dengan 11 Februari 1945. Konferensi ini dihadiri oleh Presiden Roosevelt (perwakilan dari Amerika Serikat), Perdana Menteri Winston Churchill (perwakilan dari Inggris), dan Marshall Stalin (Perwakilan dari tuan rumah, USSR). (Aybay, 1999) Saat Konferensi Yalta, Uni Soviet yang diwakili oleh Stalin, yang tidak memiliki rasa simpati terhadap kebijakan sikap netral yang diterapkan Turki

saat perang, mengangkat masalah keanggotaan dalam pertimbangan pembentukan Persatuan Bangsa-bangsa (*envisaged United Nation*). Meskipun Turki telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Jerman dan Jepang, Stalin tampaknya masih belum puas. Saat pembahasan pada persyaratan untuk diterima sebagai dalam *envisaged United Nation*, Stalin menyampaikan beberapa keberatan terhadap keanggotaan Turki. Presiden Roosevelt merespon dengan menyatakan bahwa hanya negara-negara yang telah menyatakan perang terhadap Jerman yang berhak diberikan status keanggotaan dari Asosiasi Bangsa serta mengusulkan batas waktu sampai dengan Maret 1945 bagi negara yang belum menyatakan Perang terhadap Jerman untuk menyatakan perang. Di sisi lain, Perdana Menteri Churchill menyatakan bahwa jika sekelompok besar negara-negara yang sampai saat itu masih netral, menyatakan perang pada waktu tersebut, akan membawa dampak negatif terhadap moral Jerman. (Aybay, 1999)

Setelah menyatakan Perang terhadap Jerman dan Jepang, banyak yang merasa bahwa pernyataan perang terhadap Jerman dan Jepang merupakan syarat prosedural bagi Turki untuk diterima sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa. Sebagai respons, pemerintah Jepang kemudian akan menyatakan perang terhadap Turki. Menurut laporan-laporan media massa, menteri luar negeri Jepang saat itu telah memulai mengumpulkan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan terkait pernyataan perang terhadap Turki. (Aybay, 1999)

Setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Jepang, jumlah warga negara Jepang yang tinggal di Turki pada Januari 1945, sangat kecil serta kantor *The Japan Travel Agent* dan kantor Informasi Jepang ditutup selama dua tahun karena para karyawannya yang pergi meninggalkan Turki. Tidak terdapat para

pelaku bisnis berkebangsaan Jepang yang tersisa di Turki saat itu. Hanya terdapat orang-orang Jepang dengan status diplomatik dan konsuler yang tersisa dengan jumlah sekitar 15 orang yang tinggal di Gedung Konsulat Ayazpaşa, İstanbul. (Aybay, 1999)

Setelah perang Dunia berakhir dan Jepang, Amerika Serikat, serta 47 negara lainnya, termasuk Turki, menandatangani perjanjian San Fransisco (*Japanese Peace Treaty*) pada 8 September 1951, pernyataan perang antara Jepang dengan 48 negara lain secara resmi berakhir dan kedaulatan Jepang dikembalikan oleh sekutu pada tanggal 28 April 1952. Segera setelah itu, Turki membuka kembali kedutaan besarnya di Jepang pada bulan Juni 1952 dan pada bulan April 1958 perdana menteri Turki Adnan Menderes melakukan kunjungan resmi ke Jepang. Kunjungan tersebut kemudian dibalas dengan kunjungan oleh Pangeran dan Putri Mikasa ke Turki. Kemudian setelah tahun 1980-an terdapat banyak interaksi antara Turki dengan Jepang dalam berbagai bidang termasuk kerja sama ekonomi dan pertukaran kebudayaan. (Aybay, 1999)

C. Setelah Perang Dunia Kedua

Setelah perang dunia kedua berakhir, intensitas hubungan antara Turki dan Jepang tidak tidak setinggi seperti pada era sebelumnya. Jepang yang kalah dalam Perang dunia II, menjadikan Jepang di bawah kendali sekutu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1952. Selama masa pendudukan Jepang oleh Sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Douglas A. MacArthur, para petinggi Sekutu berusaha untuk membangun kembali kondisi Jepang setelah perang dan berusaha untuk melakukan demiliterisasi terhadap Jepang. Terdapat tiga fase pendudukan Jepang yaitu pertama fase penghukuman Jepang oleh Sekutu dan upaya untuk mereformasi

pemerintahan Jepang, kedua fase pemulihan ekonomi Jepang, dan fase ketiga adalah fase perjanjian damai secara resmi. (Woodside, 2015)

Setelah perjanjian San Fransisco (*Japanese Peace Treaty*) ditandatangani pada 8 September 1951, pernyataan perang antara Jepang dengan 48 negara lain secara resmi berakhir, kemudian pada tanggal 28 April 1952 kedaulatan Jepang dikembalikan oleh Sekutu. Setelah itu, Jepang mulai kembali menjalin hubungan luar negeri dengan berbagai negara dengan membuka kedutaan besar yang ditempatkan di berbagai negara termasuk Turki membuka kembali kedutaan besarnya di Jepang pada bulan Juni 1952. (Aybay, 1999)

Setelah berakhirnya perang Dunia kedua, Republik Turki tampaknya tidak begitu berfokus pada negara-negara di Asia Timur. Turki pada era setelah Perang Dunia kedua lebih cenderung berfokus pada kondisi dalam negeri yang kondisinya tidak stabil akibat kudeta militer. Selain itu juga, Turki merupakan salah satu negara yang merasakan langsung dampak dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan dunia mulai memasuki era Perang Dingin, Republik Turki mulai diperebutkan oleh blok Amerika Serikat dan NATO serta blok Uni Soviet. Kedua kubu tersebut menganggap Turki sebagai negara yang memiliki letak strategis untuk dijadikan sekutu. Kebijakan militer Uni Soviet yang terus menekan Turki untuk bergabung dengan blok Uni Soviet pada akhirnya membuat Turki berusaha untuk mendekati diri dengan blok Barat. Kepentingan nasional Turki mendorong Turki untuk bergabung dengan aliansi blok Barat dan Turki menjadi anggota NATO. (Karpas, 1975)

Peristiwa yang sangat penting bagi hubungan antara Turki dan Jepang adalah pada saat terjadi Perang Iraq-Iran pada tahun 1985 di mana pada saat itu banyak warga negara Jepang yang terjebak dalam perang diselamatkan oleh Turki. Pada saat perang Irak-Iran, Presiden Irak, Saddam Hussein memberitahukan bahwa pesawat komersial juga akan ditembak jika melewati daerah Teheran dan serangan-serangan itu akan dimulai pada 19 Maret pukul 20:30. Setelah menerima pemberitahuan ini, banyak negara-negara lain mulai menyelamatkan dan mengevakuasi warga negaranya masing-masing. Termasuk pemerintah Jepang melalui kedutaan besar Jepang di Teheran, yaitu saat Duta Besar Jepang untuk Iran, Yutaka Nomura mencoba menghubungi pihak *Japanese Airlines* untuk membantu menyelamatkan warga negara Jepang namun permintaan itu ditolak oleh pihak *Japanese Airlines* dengan dalih tidak akan terbang ke kawasan perang tanpa ada jaminan dari Saddam Hussein. (Küçükaşci, 2013) Pada waktu itu terdapat sekitar 450 warga negara Jepang yang berada di Iran, dengan cara lain, akhirnya 250 warga negara Jepang dapat meninggalkan Iran dengan menggunakan pesawat maskapai penerbangan Eropa. 200 warga negara Jepang lainnya yang masih tertinggal di Teheran berhasil meninggalkan Iran dengan menggunakan pesawat *Turkish Airlines*. Maskapai tersebut telah mendapat perintah langsung dari Perdana Menteri Turki Turgut Ozal. Peristiwa ini telah memperlihatkan kepada masyarakat Turki dan Jepang bahwa Turki memiliki rasa simpati terhadap Jepang dan masyarakat Turki memandang masyarakat Jepang sebagai kerabat dekat mereka. (Küçükaşci, 2013)

Pada bidang ekonomi hubungan antara Turki dan Jepang kemudian dilanjutkan pada tahun 1987, di mana Federasi Bisnis Jepang yang disebut dengan

Keidanren mengadakan pertemuan dengan Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turki (*The Foreign Economic Relations Board*) untuk membentuk *Japan-Turkey Joint Economic Committee*. Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk memajukan dan memperkuat hubungan ekonomi antara Turki dengan Jepang. Kemudian pada tahun 1992 Jepang dan Turki menandatangani sebuah perjanjian mengenai promosi timbal balik dan perlindungan investasi, perjanjian ini disebut dengan *The Japan-Turkey Agreement on Investment* dan pada tahun 1993 perjanjian ini mulai diberlakukan. Tujuan dari ditandatanganinya perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Turki dan Jepang, memberikan perlakuan yang saling menguntungkan baik dalam bidang investasi dan aktivitas komersial yang berhubungan dengan investasi maupun dalam perlindungan aset investasi. Selanjutnya pada tahun 1993 Turki dan Jepang telah menyimpulkan negosiasi perjanjian untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dengan memperhatikan pada pajak penghasilan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Turki dan Jepang pada tahun 1993 dan mulai diberlakukan pada tahun 1994. (Joint Study Group, 2013)

Pada tanggal 17 Agustus 1999 terjadi gempa bumi di wilayah barat Turki tepatnya di kota Izmit. Gempa bumi dengan kekuatan 6.7 skala Richter ini terjadi di kawasan perindustrian Izmit pada pukul 03:00 kemudian disusul dengan gempa susulan dua hari setelahnya yaitu pada tanggal 19 Agustus, dan diperkirakan sekitar 17.118 orang menjadi korban yang tewas, hampir 50.000 orang terluka, dan kerugian diperkirakan mencapai 3-6,5 miliar USD akibat gempa bumi tersebut. (USGS, 2012)

Akibat peristiwa gempa bumi tersebut, banyak negara yang kemudian memberikan bantuan kepada pemerintah Turki untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan bencana tersebut, termasuk negara Jepang. Pemerintah Jepang mengirimkan tim penyelamat mereka yaitu *Japan Disaster Relief Team (JDRT)* ke Turki dengan maksud untuk menyediakan bahan bantuan darurat segera setelah menerima permintaan bantuan dari pemerintah Turki. Pemerintah Jepang mengirimkan dua tim penyelamat ke Turki untuk satu Minggu yang terdiri dari 20 orang di tim pertama kemudian mengirim 17 orang lagi di tim kedua, serta satu tim medis yang terdiri dari 16 orang, namun kemudian Jepang memutuskan untuk memperpanjang waktu pengiriman bantuan ini. Selain itu Jepang juga memberikan bantuan dana dengan total mencapai US\$ 1.000.000, US\$ 600.000 merupakan bantuan dana dan US\$ 400.000 merupakan bantuan material darurat seperti tenda, selimut, generator, alas tidur, lembaran plastik dan tangki air. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999)

Jepang kembali mengirimkan bantuannya ke Turki pada tanggal 20 Agustus, kali ini Jepang mengirimkan tim JDRT di bidang pemeriksaan gempa sebanyak delapan orang yang di antaranya satu orang dari Kementerian Luar negeri, satu orang Kementerian Pertanahan Nasional, tiga orang dari Kementerian Konstruksi, dan tiga orang dari JICA. *Japan International Cooperation Agency* atau disingkat dengan JICA adalah agensi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk mengkoordinasi bantuan resmi berupa *Official Development Assistance (ODA)*. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999) Tim ketiga yang dikirim dari Jepang ini bertugas untuk memeriksa ketahanan gempa bumi sebuah bangunan, struktur bangunan sipil, derap hidup daerah yang dilanda gempa, dan

memerikan saran ke Markas Bencana agar pemerintah Turki mampu melakukan penanggulangan dan aktivitas rehabilitasi dengan cepat dan tanpa hambatan. Selain itu, Jepang juga mengirimkan tim yang terdiri dari 11 pejabat Prefektur Hyogo dan Kota Kobe yang terlibat dalam rehabilitasi derap hidup setelah gempa bumi dahsyat yang melanda daerah Hanshin-Awaji. Mereka akan melakukan investigasi langsung di tempat kejadian dan memberikan saran kepada pemerintah lokal terkait rehabilitasi derap hidup, berdasarkan pengalaman mereka setelah gempa bumi di daerah Hanshin-Awaji. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999)

Pada tanggal 27 Agustus, Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan bantuan darurat dengan total senilai sekitar 2 juta untuk Republik Turki, sebagai bantuan darurat tambahan untuk negara yang dilanda gempa bumi besar. Bantuan ini terdiri dari bantuan hibah darurat senilai satu juta USD dan bantuan material darurat senilai sekitar satu juta USD (untuk generator, perlengkapan tukang kayu, selimut, tangki air, dll). (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999) Bersamaan dengan bantuan darurat ini, Jepang juga mengirimkan sumbangan makanan yang disediakan oleh para pelaku bisnis, dengan kerja sama dari Kementrian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan untuk menyediakan perumahan sementara, dengan mempertimbangkan kebutuhan sisi Turki. Selain itu, Pada tanggal 26 Agustus, Pemerintah Jepang memutuskan untuk mengirimkan tim medis yang terdiri dari 15 orang (satu pejabat dari Kementrian Luar Negeri, dua dokter, enam perawat, tiga koordinator medis, dan tiga untuk operasi tugas), selama sekitar dua Minggu dari 27 Agustus untuk Turki. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999)

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kontribusi senilai 21,5 juta Yen kepada sebuah LSM Jepang (*Shanti Volunteer Association*) yang melaksanakan proyek bantuan untuk orang-orang yang kehilangan rumah mereka akibat gempa bumi di Turki. Ini pertama kalinya bagi Pemerintah Jepang dalam memperluas dukungan keuangan untuk kegiatan bantuan oleh LSM Jepang, dari sekian bantuan darurat yang telah diperbanyak jenisnya kepada korban bencana setelah peristiwa gempa bumi. Kota Adapazari, di mana bantuan ini diimplementasikan dalam kegiatan LSM, merupakan salah satu daerah yang paling parah dilanda gempa. Penyediaan fasilitas penghangat untuk para korban bencana yang kehilangan rumah mereka merupakan tugas yang mendesak sebelum musim dingin datang pada pertengahan November. Bantuan ini merupakan kontribusi dalam menanggapi permintaan dari LSM yang membantu melalui kegiatan seperti memasang pemanas dan juga memperbaiki kondisi lingkungan hidup termasuk sanitasi. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999)

Tiga bulan setelah bencana gempa bumi di Kota Izmit terjadi, peristiwa gempa bumi kembali melanda Turki tepatnya di kota Duzce, Provinsi Bolu di barat laut Turki. Bencana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 1999 sekitar pukul 18:57 waktu setempat. Gempa bumi yang tercatat memiliki kekuatan sebesar 7,2 Skala Richter, menyebabkan kerusakan banyak di Provinsi Bolu. Menurut informasi dari Kantor Perdana Menteri Turki, Gempa bumi ini memakan korban sebanyak 452 kematian, 2.386 luka-luka dan 722 kasus bangunan runtuh. Bantuan dari pemerintah Jepang untuk Turki terus berlanjut, pada tanggal 15 November 1999 Pemerintah Jepang memutuskan untuk mengirimkan tim medis dari Tim Bantuan Bencana Jepang (JDRT) yang terdiri dari 19 orang anggota,

bersama dengan obat-obatan dan peralatan medis, untuk kurun waktu selama kurang lebih dua Minggu ke Republik Turki, yang kembali mengalami gempa bumi berskala besar. Pemerintah Jepang juga telah memutuskan untuk memperpanjang bahan bantuan darurat berupa selimut dan alas tidur dengan total senilai 24.77 Juta Yen dan bantuan dana hibah senilai 500.000 dolar. Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan bantuan darurat ini dari sudut pandang kemanusiaan, dan dengan mempertimbangkan tingkat keparahan bencana serta hubungan persahabatan antara Jepang dan Turki. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999)

Pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan pinjaman melalui *Official Development Assistance* (ODA) dengan total mencapai 23,6 miliar Yen untuk Pemerintah Republik Turki, yang mengalami kerusakan besar akibat gempa bumi yang terjadi di negara itu pada tahun 1999, dengan tujuan untuk membantu pemulihan dan rehabilitasi negara serta memperbaiki neraca pembayaran (*balance of payment*) negara Turki yang memburuk. Pemberian bantuan ini dilaksanakan di Ankara pada tanggal 20 Desember 1999, oleh Shigeo Takenaka selaku Duta Besar Jepang untuk Turki pada saat itu, dan Selcuk Demiralp selaku wakil Perbendaharaan Negara Republik Turki. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999) Isi dari pinjaman ODA ini adalah Jenis pinjaman berupa Pinjaman komoditas dengan jumlah maksimum sebesar ¥ 23.6 miliar, tingkat bunga sebesar 2,2%, periode pembayaran selama 25 tahun (termasuk masa tenggang 7 tahun), dan metode pengadaan bersifat umum mengikat. Selain itu tujuan pinjaman digunakan untuk mengimpor bahan yang dibutuhkan untuk pemulihan dan rehabilitasi setelah bencana gempa bumi (termasuk biaya layanan seperti transportasi). Dana yang akan

diberikan di bawah pinjaman dapat digunakan dengan meninjau peristiwa lampau untuk menyelesaikan rekening untuk bahan dan jasa impor yang dibeli pada atau setelah 17 Agustus 1999. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 1999)

Setelah serangkaian pemberian bantuan akibat gempa bumi di Turki tahun 1999, Menteri Luar Negeri Jepang, Yohei Kono, mengundang Menteri Luar Negeri Republik Turki, Ismail Cem, untuk mengunjungi Jepang dari tanggal 4 hingga 9 April 2000. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah untuk membuat ulasan dari keseluruhan hubungan persahabatan dan kerja sama antara kedua negara yang telah dipelihara sejak abad ke-19 dan untuk mencari cara-cara baru dalam bekerja sama di abad ke-21. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2000) Kunjungan itu dilaksanakan dengan latar belakang memperdalam hubungan bilateral Turki dan Jepang, terutama bantuan dan kerja sama yang diberikan oleh Jepang kepada Turki untuk bersama-sama mengatasi dampak dari gempa bumi parah yang melanda Turki sebanyak dua kali pada tahun sebelumnya. Menteri Luar Negeri Cem menyampaikan apresiasi yang mendalam atas bantuan Jepang dan kontribusinya terhadap kebutuhan darurat, serta pemulihan akibat tragedi tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri Turki juga menyampaikan apresiasinya untuk berbagai tindakan bantuan yang diambil oleh Jepang dalam menyelesaikan operasi bantuan bencana pada gempa bumi lalu, seperti pengiriman Tim Bantuan Bencana Jepang (JDRT), menyediakan bantuan dana hibah darurat serta bahan bantuan darurat, sumbangan rumah pra-fabrikasi, penyediaan transportasi oleh *Japan Maritime Self-Defense Force*, memperpanjang pinjaman ODA sebagai upaya darurat yang ditujukan untuk rehabilitasi, bantuan melalui LSM, studi pembangunan, dan lain sebagainya. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2000)

Kemudian dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas mengenai hubungan kerja sama ekonomi Turki dan Jepang. Menteri Luar Negeri Turki menyampaikan apresiasinya untuk kerja sama ekonomi Jepang dengan Turki, yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Turki dan stabilitas kawasan, kemudian kedua belah pihak menyatakan harapan mereka mengenai *Bosphorus Rail Project Tube Crossing* akan menjadi salah satu simbol lain dari kerja sama antara kedua negara, di samping Jembatan Bosphorus kedua, yang dibiayai sebagai proyek pinjaman bantuan. Kedua belah pihak juga menyambut peluncuran bantuan dana hibah Jepang untuk proyek-proyek yang ditujukan pada masyarakat kelas menengah ke bawah di Turki. (Ministry Of Foreign Affairs of Japan, 2000) Selain itu, pihak Turki dan Jepang memperhatikan fakta bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara terus berkembang, sebagaimana dapat dilihat dalam pembentukan Komite Ekonomi Bersama Jepang-Turki (*Japan-Turkey Joint Economic Committee*), dengan hasil dari kesepakatan berupa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, kesepakatan mengenai Promosi Timbal Balik dan Perlindungan Investasi, serta perjanjian mengenai "*Air Services*". Kedua pihak mengungkapkan rasa puas mereka dengan saling bertukar pendapat mengenai perubahan Lampiran dari Persetujuan untuk "*Air Services*", yang membuka "Jalur Sutera di udara," dan berharap bahwa hal tersebut akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pariwisata antara kedua negara. Turki dan Jepang menegaskan niat mereka untuk melakukan upaya dalam mengembangkan hubungan perdagangan yang seimbang. Turki dan Jepang selanjutnya menegaskan dukungan mereka untuk kegiatan Komite Ekonomi

Bersama Jepang-Turki (*Japan-Turkey Joint Economic Committee*). (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2000)

Selanjutnya, Kedua Menteri Luar Negeri menggarisbawahi pentingnya kegiatan budaya dalam mewujudkan hubungan yang lebih dekat dan mendorong terciptanya rasa saling pengertian antara orang Jepang dan orang Turki agar saling menghargai persahabatan yang telah terjalin. Kemudian Menteri Luar Negeri kedua negara memutuskan untuk meneruskan upaya dalam meningkatkan hubungan budaya Turki dan Jepang. Mengingat bahwa Yayasan Pusat Kebudayaan Turki-Jepang (*Turkish-Japanese Foundation Culture Center*) yang telah didirikan pada tahun 1998 merupakan hasil kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah dari kedua negara, dan upacara pembukaan Yayasan Pusat Kebudayaan Turki-Jepang diadakan dengan dihadiri oleh Pangeran dan Putri Tomohito dari Mikasa. Kedua menteri menegaskan untuk lebih mendukung Pusat Kebudayaan Turki-Jepang. Pihak Turki dan Jepang Juga sepakat bahwa hubungan kerja sama kedua negara dilambangkan dalam "*Japan Village*" di Turki, tidak akan diubah. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2000)

Hubungan bilateral antara Turki dan Jepang tampak selalu berjalan mulus. Bahkan saat Perang Dunia II terjadi dan Turki memutuskan untuk bergabung melawan pihak Axis, yang berarti Turki secara resmi bergabung melawan Jepang, kedua negara tidak pernah secara langsung bertemu di medan perang. Setelah perang berakhir, Turki dan Jepang langsung membuka kedutaan besar di masing-masing negara sehari setelah pernyataan perang dicabut. Kedua negara saling membantu jika salah satu mengalami kesulitan, seperti pemerintah Turki yang memerintahkan pesawat *Turkish Airlines* untuk mengevakuasi warga Jepang dari

Iran saat Perang Teluk dan Pemerintah Jepang yang mengirim bantuan material dan tenaga medis saat Turki mengalami bencana alam berupa gempa bumi. Memasuki abad ke 21, fokus kerja sama dalam hubungan Turki dan Jepang adalah pada bidang ekonomi. Turki berusaha meningkatkan investasi dari Jepang dan Jepang terus berinvestasi pada perusahaan-perusahaan di Turki dan pada proyek-proyek besar di Turki. Kedua negara juga telah berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama antara Turki dan Jepang ke tingkat yang lebih tinggi, terutama di bidang ekonomi.

D. Hubungan Turki dan Jepang Setelah Tahun 2000

Pada tahun 2003 telah ditetapkan sebagai "Tahun Turki di Jepang" (*Year of Turkey in Japan*) dengan keputusan bersama dari Menteri Luar Negeri Turki dan Jepang. Acara tersebut diadakan dengan maksud untuk lebih memajukan hubungan historis yang telah ada sejak lama antara Jepang dan Turki dan memberikan kontribusi untuk mempromosikan negara Turki. Acara tersebut dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri Turki, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan pegawai Perdagangan Luar Negeri, banyak lembaga swasta dan organisasi telah ikut berpartisipasi dalam acara "2003: Tahun Turki di Jepang", termasuk kegiatan-kegiatan di kota padat penduduk di Jepang. Perhatian khusus telah diberikan untuk memilih aset budaya yang mampu menarik perhatian orang-orang Jepang ketika merencanakan kegiatan. Acara ini mulai di gelar pada tanggal 17 Februari 2003, dan budaya Turki telah dipromosikan ke masyarakat Jepang dengan lebih dari 100 kegiatan budaya, seni, ekonomi dan wisata yang diselenggarakan di Jepang. (Ministry Of Foreign Affair of Turkey, 2011)

Hasil dari perayaan “Tahun Turki di Jepang” adalah terjalinnya kerja sama antarkota, yaitu kota Shibuya dan Uskudar. Pada tanggal 5 September 2005, distrik Shibuya di Tokyo dan distrik Uskudar di Istanbul menandatangani *Friendship Alliance Agreement*. Kedua pihak tersebut memiliki keinginan yang sama agar dapat mempromosikan persahabatan kedua distrik, sekaligus mengupayakan pertukaran kebudayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. (Shibuya City Office, 2008)

Awal mula perjanjian antara Shibuya dan Uskudar ini berawal dari perayaan “Tahun Turki di Jepang” (*Year of Turkey*) yang menarik perhatian masyarakat Shibuya. Kemudian setahun setelah perayaan tersebut, atas undangan dari Duta Besar Republik Turki, pemerintah Kota Shibuya yang diwakilkan oleh Majelis Kota Shibuya berkunjung ke Turki dan mempelajari peluang dilakukannya Aliansi Persahabatan. Kunjungan tersebut dilakukan pada bulan Juni 2005. Sebelumnya pada bulan Mei 2005, Walikota Uskudar mengajak Walikota Shibuya untuk berkunjung ke Uskudar agar dapat memahami budaya Islam. Kemudian, Walikota Shibuya bersama dengan Majelis kota Shibuya membentuk sebuah delegasi yang beranggotakan 5 orang Majelis kota Shibuya, dan 4 anggota partai politik, untuk mempromosikan "Perjanjian Aliansi Persahabatan dengan Uskudar dan pertukaran budaya dengan Republik Turki." (Shibuya City Office, 2008)

Setelah diadakannya “Tahun Turki di Jepang” pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mempromosikan budaya Turki, berikutnya giliran budaya Jepang yang dipromosikan ke masyarakat Turki. Tahun 2010 yang sekaligus menandai hari jadi ke-120 persahabatan Turki dan Jepang, telah diputuskan untuk diperingati sebagai "Tahun Jepang di Turki" dengan semboyan "Turki dan Jepang, sekarang jauh lebih

dekat". Kegiatan yang dilakukan dalam konteks ini, tidak hanya diadakan di Istanbul, tapi juga di kota-kota yang lainnya di Turki seperti Izmir, Mersin, Ankara, Safranbolu dan Kaman, dan berbagai ragam budaya dan seni Jepang dipamerkan sepanjang tahun 2010. (Ministry Of Foreign Affair of Turkey, 2011) Dalam perayaan "Jepang Tahun 2010 di Turki", tidak hanya Presiden Turki, Abdullah Gül yang turut berpartisipasi, tetapi juga Pangeran Jepang, Pangeran Tomohito dari Mikasa, ikut hadir dalam "Upacara Perayaan Persahabatan Jepang-Turki" yang diadakan di Istanbul pada tanggal 3 Mei 2010. Kemudian pada bulan Juli dilakukan peresmian gedung "*Kaman Kalehöyük Archaeological Museum*" yang didirikan atas hasil kerja sama Jepang dan Turki. "Tahun Jepang 2010 di Turki" merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan keindahan Jepang ke orang-orang Turki, dan memperdalam persahabatan. Perayaan "2010: Tahun Jepang di Turki" berakhir dengan upacara penutupan yang diadakan di Pusat Kebudayaan dan Kongres İstanbul Haliç pada 25 November 2010. (Ministry Of Foreign Affair of Turkey, 2011)

Pada tahun 2010, Jepang berkontribusi dalam melakukan investasi langsung di Turki dengan jumlah investasi sebesar US \$ 352 Juta atau 5,3% dari jumlah seluruh investasi asing langsung di Turki. (Morrison, 2014) Perusahaan Jepang yang sukses bergerak di Turki meliputi sektor konstruksi, mobil, mesin, dan barang-barang elektronik. Cakupan aktivitas bisnis Jepang yang terdapat di Turki sekarang meluas ke sektor perbankan, asuransi, media dan makanan. Saat itu ada sekitar 162 perusahaan Jepang yang melakukan bisnis di Turki dengan modal dari Jepang. Di sektor perbankan dan keuangan, Mizuho Corporate Bank Ltd menandatangani perjanjian kemitraan dengan Akbank TAS, pada bulan September

2012. Selain itu, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, menginvestasikan dana sebesar US \$ 303 Juta untuk mendirikan anak perusahaan lokal dan memulai operasinya di Turki pada tahun 2013. (Morrison, 2014)

Posisi Jepang dalam visi kebijakan luar negeri jangka panjang pemerintah Turki, tidak terbatas pada bidang ekonomi. Pidato Perdana Menteri Ahmet Davutoğlu dalam sebuah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Koichiro Gamba, pada Januari 2012 menunjukkan bahwa Turki bersedia untuk meningkatkan hubungan baik dengan Jepang pada kerja sama ekonomi, strategis, dan budaya. Dalam pidatonya Perdana Menteri Ahmet Davutoğlu mengatakan bahwa pihak Turki dan Jepang akan terus berusaha meningkatkan volume perdagangan bilateral dan mewujudkan Perjanjian Kerangka Kerja sama Ekonomi (*Economic Cooperation Framework Agreement*) dan Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*). Selain itu, Perdana Menteri Davutoğlu juga mengatakan akan mengundang lebih banyak investor dari Jepang dan mengundang lebih banyak lagi perusahaan Jepang untuk beroperasi di Turki. Dan berusaha untuk meningkatkan kerja sama di bidang strategis dan keamanan. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2012)

Selanjutnya di tahun 2013, Turki membuat kesepakatan dengan Jepang dalam hal Kerja sama Proyek Sinop, di mana akan dibangun reaktor nuklir di Turki dengan bantuan dari Jepang. Tidak hanya itu, Jepang juga akan menutupi biaya pembangunan reaktor nuklir yang baru sesuai dengan perjanjian. Proyek Sinop adalah simbol dari peningkatan hubungan baik antara Jepang dan Turki, serta mampu menjadi penguat hubungan bilateral antara Turki dan Jepang. (Morrison, 2014)

Selama kunjungan kedua Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe ke Turki pada bulan Oktober 2013, Perdana Menteri Jepang menghadiri upacara pembukaan terowongan bawah laut terbesar Turki di Istanbul yang membentang di Selat Bosphorus. (Miller, 2014) Pada acara peresmian proyek terowongan Marmaray, Shinzo Abe mengatakan bahwa proyek tersebut telah berhasil dicapai berkat kerja sama antara peralatan berteknologi tinggi dari Jepang dan tenaga kerja yang berpengalaman dari Turki. Perdana Menteri Shinzo Abe juga berharap proyek tersebut dapat menjadi simbol baru persahabatan antara Turki dan Jepang. Jepang telah memiliki peran besar di hampir setiap tahap terowongan Marmaray. Kontraktor terowongan adalah konsorsium Jepang-Turki, TGN, yang terdiri dari Jepang Taisei Corp. serta mitra proyek Turki yaitu Nurol dan Gama. Sebagian besar pembiayaan untuk proyek, yang diperkirakan menelan biaya sekitar 9,3 miliar Liras Turki (\$ 4,5 miliar) setelah semuanya selesai, diberikan oleh *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC). (Miller, 2014)